

DAFTAR ISIAN

TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Desa: MELINGKAT

Kecamatan: Kayan Hilir

Kabupaten: KAB. SINTANG

Provinsi: KALIMANTAN BARAT

Bulan: 6

Tahun: 2023

Nama Pengisi: YUDAS ISKARIOT

Pekerjaan: PERANGKAT DESA

Jabatan: KAUR UMUN DAN PERENCANAAN

Kepala Desa / Lurah: JAMHIRUDIN

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN

UNTUK MENGISI PROFIL

DESA/KELURAHAN

Referensi 1 :

Referensi 2:

Referensi 3:

Referensi 4:

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk

| Jumlah                     | Jenis Kelamin |           |
|----------------------------|---------------|-----------|
|                            | Laki-laki     | Perempuan |
| Jumlah penduduk tahun ini  | 368 orang     | 368 orang |
| Jumlah penduduk tahun lalu | 311 orang     | 297 orang |
| Persentase perkembangan    | 18.33 %       | 23.91 %   |

B. Jumlah Keluarga

| Jumlah                            | KK Laki-laki | KK Perempuan | Jumlah Total |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jumlah Kepala Keluarga tahun ini  | 368 KK       | 365 KK       | 733 KK       |
| Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu | 364 KK       | 345 KK       | 709 KK       |
| Prosentase Perkembangan           | 1.1 %        | 5.8 %        |              |

II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)                     | orang |
| 2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja | orang |
| 3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga        | orang |
| 4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh                   | orang |
| 5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu             | orang |
| 6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja         | orang |
| 7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja               | orang |

B. Kesejahteraan Keluarga

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Jumlah keluarga prasejahtera     | keluarga   |
| 2. Jumlah keluarga sejahtera 1      | keluarga   |
| 3. Jumlah keluarga sejahtera 2      | keluarga   |
| 4. Jumlah keluarga sejahtera 3      | keluarga   |
| 5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus | keluarga   |
| 6. Total jumlah kepala keluarga     | 0 keluarga |

III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO

A. SUBSEKTOR PERTANIAN

| Tanaman | Luas Produksi (Ha) | Hasil Produksi (Ton/Ha) | Nilai produksi (Rp) | Biaya pemupukan (Rp) | Biaya bibit (Rp) | Biaya obat (Rp) | Biaya lainnya (Rp) |
|---------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
|         |                    |                         |                     |                      |                  |                 |                    |

B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN

| Tanaman | Luas Produksi (Ha) | Hasil Produksi (Ton/Ha) | Nilai produksi (Rp) | Biaya pemupukan (Rp) | Biaya bibit (Rp) | Biaya obat (Rp) | Biaya lainnya (Rp) |
|---------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
|         |                    |                         |                     |                      |                  |                 |                    |

C. SUBSEKTOR PETERNAKAN

| Jenis Produksi | Hasil Produksi | Nilai produksi (Rp) | Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp) | Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp) | Jumlah Ternak (Ekor) |
|----------------|----------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
|                |                |                     |                                    |                                        |                      |

prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan\_terkini\_tingkat/laporan\_terkini\_tingkat.php?&tahun=2023&kodesa=6107160012

1/17

|                                                           |                            |                     |                                    |                                        |                                         |                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|                                                           |                            |                     |                                    |                                        |                                         |                       |
| <b>D. SUBSEKTOR PERIKANAN</b>                             |                            |                     |                                    |                                        |                                         |                       |
| Jenis Produksi                                            | Hasil Produksi (Ton/Tahun) | Nilai produksi (Rp) | Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp) | Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp) | Total biaya antara yang dihabiskan (Rp) | Jenis usaha perikanan |
|                                                           |                            |                     |                                    |                                        |                                         |                       |
| <b>E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN</b>                  |                            |                     |                                    |                                        |                                         |                       |
| Total nilai produksi tahun ini                            |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Total nilai bahan baku yang digunakan                     |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan                 |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Total biaya antara yang dihabiskan                        |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada      |                            |                     |                                    |                                        | 0 jenis                                 |                       |
| <b>F. SUBSEKTOR KERAJINAN</b>                             |                            |                     |                                    |                                        |                                         |                       |
| Total nilai produksi tahun ini                            |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Total nilai bahan baku yang digunakan                     |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan                 |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Total biaya antara yang dihabiskan                        |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Total jenis kerajinan rumah tangga                        |                            |                     |                                    |                                        | jenis                                   |                       |
| <b>G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN</b>                      |                            |                     |                                    |                                        |                                         |                       |
| <b>H. SUBSEKTOR KEHUTANAN</b>                             |                            |                     |                                    |                                        |                                         |                       |
| Total nilai produksi tahun ini                            |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Total nilai bahan baku yang digunakan                     |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan                 |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Total biaya antara yang dihabiskan                        |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| <b>I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN</b>          |                            |                     |                                    |                                        |                                         |                       |
| <b>I.1. Subsektor Perdagangan Besar</b>                   |                            |                     |                                    |                                        |                                         |                       |
| Total nilai transaksi                                     |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Total nilai aset perdagangan yang ada                     |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Total jumlah jenis perdagangan besar                      |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Total nilai biaya yang dikeluarkan                        |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Total biaya antara lainnya                                |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| <b>I.2. Subsektor Perdagangan Eceran</b>                  |                            |                     |                                    |                                        |                                         |                       |
| Jumlah total jenis perdagangan eceran                     |                            |                     |                                    |                                        | jenis                                   |                       |
| Total nilai transaksi                                     |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Total nilai biaya yang dikeluarkan                        |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Total nilai aset perdagangan eceran                       |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| <b>I.3. Subsektor Hotel</b>                               |                            |                     |                                    |                                        |                                         |                       |
| Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada |                            |                     |                                    |                                        | jenis                                   |                       |
| Jumlah total pendapatan                                   |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Jumlah total biaya pemeliharaan                           |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Jumlah biaya antara yang dikeluarkan                      |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Jumlah total pendapatan yang diperoleh                    |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| <b>I.4. Subsektor Restoran</b>                            |                            |                     |                                    |                                        |                                         |                       |
| Jumlah tempat penyediaan konsumsi                         |                            |                     |                                    |                                        | Unit                                    |                       |
| Biaya konsumsi yang dikeluarkan                           |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Biaya antara lainnya                                      |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Jumlah total pendapatan yang diperoleh                    |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| <b>J. Sektor Bangunan/Konstruksi</b>                      |                            |                     |                                    |                                        |                                         |                       |
| Jumlah bangunan yang ada tahun ini                        |                            |                     |                                    |                                        | unit                                    |                       |
| Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan                       |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Total nilai bangunan yang ada                             |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Biaya antara lainnya                                      |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| <b>K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan</b>  |                            |                     |                                    |                                        |                                         |                       |
| <b>K.1. Subsektor Bank</b>                                |                            |                     |                                    |                                        |                                         |                       |
| Jumlah transaksi perbankan                                |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Jumlah nilai transaksi perbankan                          |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |
| Jumlah biaya yang dikeluarkan                             |                            |                     |                                    |                                        | Rp. 0,00                                |                       |

|                                                                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank</b>                                                                                             |          |
| Jumlah lembaga keuangan bukan bank                                                                                                            | Unit     |
| Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank                                                                                    | Jenis    |
| Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank                                                                                                   | Rp. 0,00 |
| Biaya yang dikeluarkan                                                                                                                        | Rp. 0,00 |
| <b>K.3. Subsektor Sewa Bangunan</b>                                                                                                           |          |
| Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah                                                                                                     | unit     |
| Total nilai persewaan yang dicapai                                                                                                            | Rp. 0,00 |
| Biaya yang dikeluarkan                                                                                                                        | Rp. 0,00 |
| Biaya lainnya                                                                                                                                 | Rp. 0,00 |
| <b>K.4. Subsektor Jasa Perusahaan</b>                                                                                                         |          |
| Jumlah perusahaan jasa                                                                                                                        | Jenis    |
| Nilai transaksi perusahaan jasa                                                                                                               | Rp. 0,00 |
| Biaya yang dikeluarkan                                                                                                                        | Rp. 0,00 |
| Biaya lainnya                                                                                                                                 | Rp. 0,00 |
| <b>L. SEKTOR JASA-JASA</b>                                                                                                                    |          |
| <b>L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum</b>                                                                                                  |          |
| Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat                                                                                    | unit     |
| Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat                                                                                      | Rp. 0,00 |
| Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan                                                                                                        | Rp. 0,00 |
| <b>L.2. Subsektor jasa swasta</b>                                                                                                             |          |
| Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat                                                                                 | jenis    |
| Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial                                                                                                     | Rp. 0,00 |
| Biaya yang dikeluarkan                                                                                                                        | Rp. 0,00 |
| <b>L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi</b>                                                                                               |          |
| Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi                                                                                                        | jenis    |
| Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi                                                                                               | Rp. 0,00 |
| Biaya antara yang dikeluarkan                                                                                                                 | Rp. 0,00 |
| <b>L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga</b>                                                                                        |          |
| Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga                                                                              | jenis    |
| Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga                                                                                         | Rp 0,00  |
| Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga                                                                                    | Rp 0,00  |
| Biaya antara yang dikeluarkan                                                                                                                 | Rp 0,00  |
| <b>M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>                                                                                                      |          |
| <b>M.1. Subsektor Angkutan</b>                                                                                                                |          |
| Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan | Jenis    |
| Jumlah total kendaraan angkutan                                                                                                               | Unit     |
| Nilai total transaksi pengangkutan                                                                                                            | Rp 0,00  |
| Nilai total biaya yang dikeluarkan                                                                                                            | Rp 0,00  |
| <b>N. SEKTOR LISTRIK, GAS &amp; AIR MINUM</b>                                                                                                 |          |
| <b>N.1. Subsektor Listrik</b>                                                                                                                 |          |
| Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik                                                                              | Jenis    |
| Jumlah nilai produksi listrik                                                                                                                 | Rp 0,00  |
| Jumlah total nilai transaksi                                                                                                                  | Rp 0,00  |
| Jumlah biaya antara yang dikeluarkan                                                                                                          | Rp 0,00  |
| <b>N.2. Subsektor Gas</b>                                                                                                                     |          |
| Jumlah kegiatan penyediaan gas                                                                                                                | jenis    |
| Nilai aset produksi gas                                                                                                                       | Rp 0,00  |
| Nilai transaksi                                                                                                                               | Rp 0,00  |
| Biaya antara yang dikeluarkan                                                                                                                 | Rp 0,00  |
| <b>N.3. Subsektor Air Minum</b>                                                                                                               |          |
| Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum                                                                                     | jenis    |
| Nilai aset penyediaan air minum                                                                                                               | Rp 0,00  |
| Nilai produksi air minum                                                                                                                      | Rp 0,00  |
| Nilai transaksi air minum                                                                                                                     | Rp 0,00  |
| Biaya antara yang dikeluarkan                                                                                                                 | Rp 0,00  |

IV. PENDAPATAN PERKAPITA

A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha

| B. PENDAPATAN RILL KELUARGA                          |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Jumlah Kepala Keluarga                               | KK      |
| Jumlah Anggota Keluarga                              | orang   |
| Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga                    | Rp 0,00 |
| Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja | Rp 0,00 |

V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR

| 1. Sektor Pertanian                               |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Petani                                            | orang |
| Buruh Tani                                        | orang |
| Pemilik Usaha Tani                                | orang |
|                                                   |       |
| 2. Sektor Perkebunan                              |       |
| Karyawan Perusahaan Perkebunan                    | orang |
| Buruh perkebunan                                  | orang |
| Pemilik usaha Perkebunan                          | orang |
|                                                   |       |
| 3. Sektor Peternakan                              |       |
| Peternakan Perorangan                             | orang |
| Buruh Usaha Peternakan                            | orang |
| Pemilik Usaha Peternakan                          | orang |
|                                                   |       |
| 4. Sektor Perikanan                               |       |
| Nelayan                                           | orang |
| Buruh Usaha Perikanan                             | orang |
| Pemilik Usaha Perikanan                           | orang |
|                                                   |       |
| 5. Sektor Kehutanan                               |       |
| Pengumpul Hasil Hutan                             | orang |
| Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan                | orang |
| Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan              | orang |
|                                                   |       |
| 6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C         |       |
| Penambang Galian C Perorangan                     | orang |
| Buruh Usaha Pertambangan                          | orang |
| Pemilik Usaha Pertambangan                        | orang |
|                                                   |       |
| 7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga |       |
|                                                   |       |
| 8. Sektor Industri Menengah dan Besar             |       |
|                                                   |       |
| 9. Sektor Perdagangan                             |       |
| Karyawan Perdagangan Hasil Bumi                   | orang |
| Buruh Perdagangan Hasil Bumi                      | orang |
| Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi                  | orang |
|                                                   |       |
| 10. Sektor Jasa                                   |       |
|                                                   |       |

VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT

| A. ASET TANAH                      |       |
|------------------------------------|-------|
| Tidak memiliki tanah               | orang |
| Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha   | orang |
| Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha  | orang |
| Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha  | orang |
| Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha  | orang |
| Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha  | orang |
| Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha  | orang |
| Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha  | orang |
| Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha  | orang |
| Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha  | orang |
| Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha | orang |
| memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha  | orang |
| Memiliki tanah lebih dari 10 ha    | orang |

|                                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jumlah total penduduk                                                                          | orang |
| <b>B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM</b>                                                        |       |
|                                                                                                |       |
| <b>C. ASET SARANA PRODUKSI</b>                                                                 |       |
| Memiliki penggilingan padi                                                                     | orang |
| Memiliki traktor                                                                               | orang |
| Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian                                                     | orang |
| Memiliki kapal penangkap ikan                                                                  | orang |
| Memiliki alat pengolahan hasil perikanan                                                       | orang |
| Memiliki alat pengolahan hasil peternakan                                                      | orang |
| Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan                                                      | orang |
| Memiliki alat pengolahan hasil hutan                                                           | orang |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan                                         | orang |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata                                           | orang |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan                            | orang |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah | orang |
| Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas                                     | orang |
| <b>D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING</b>                                                 |       |
|                                                                                                |       |
| <b>RUMAH MENURUT LANTAI</b>                                                                    |       |
|                                                                                                |       |
| <b>RUMAH MENURUT ATAP</b>                                                                      |       |

VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA

VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>A. Tingkat Pendidikan Penduduk</b>                                  |       |
| Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin                            | orang |
| Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak | orang |
| Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental                        | orang |
| Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat                                   | orang |
| Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat                                    | orang |
| Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat                              | orang |
| Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat                                 | orang |
| Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat                                  | orang |
| Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat                                 | orang |
| Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat                            | orang |
| Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat                                  | orang |
| Jumlah penduduk sedang D-1                                             | orang |
| Jumlah penduduk tamat D-1                                              | orang |
| Jumlah penduduk sedang D-2                                             | orang |
| Jumlah penduduk tamat D-2                                              | orang |
| Jumlah penduduk sedang D-3                                             | orang |
| Jumlah penduduk tamat D-3                                              | orang |
| Jumlah penduduk sedang S-1                                             | orang |
| Jumlah penduduk tamat S-1                                              | orang |
| Jumlah penduduk sedang S-2                                             | orang |
| Jumlah penduduk tamat S-2                                              | orang |
| Jumlah penduduk tamat S-3                                              | orang |
| Jumlah penduduk sedang SLB A                                           | orang |
| Jumlah penduduk tamat SLB A                                            | orang |
| Jumlah penduduk sedang SLB B                                           | orang |
| Jumlah penduduk tamat SLB B                                            | orang |
| Jumlah penduduk sedang SLB C                                           | orang |
| Jumlah penduduk tamat SLB C                                            | orang |
| Jumlah penduduk cacat fisik dan mental                                 | orang |
|                                                                        |       |
| <b>B. Wajib belajar 9 tahun</b>                                        |       |
| 1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun                                     | orang |
| 2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah                  | orang |
| 3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah                  | orang |
|                                                                        |       |
| <b>C. Rasio Guru dan Murid</b>                                         |       |
| 1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak                            | orang |
| 2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak                           | orang |
| 3. Jumlah guru SD dan sederajat                                        | orang |
| 4. Jumlah siswa SD dan sederajat                                       | orang |
| 5. Jumlah guru SLTP dan sederajat                                      | orang |

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat                                                | orang      |
| 7. Jumlah guru SLTA/sederajat                                                     | orang      |
| 8. Jumlah siswa SLTA/sederajat                                                    | orang      |
| 9. Jumlah siswa SLB                                                               | orang      |
| 10. Jumlah guru SLB                                                               | orang      |
| <b>D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat</b>                                       |            |
| Jumlah perpustakaan desa/kelurahan                                                | unit       |
| Jumlah taman bacaan desa/kelurahan                                                | unit       |
| Jumlah perpustakaan keliling                                                      | unit       |
| Jumlah sanggar belajar                                                            | unit       |
| Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah                                   | kegiatan   |
| Jumlah kelompok belajar Paket A                                                   | kelompok   |
| Jumlah peserta ujian Paket A                                                      | orang      |
| Jumlah kelompok belajar Paket B                                                   | kelompok   |
| Jumlah Peserta ujian Paket B                                                      | orang      |
| Jumlah kelompok belajar Paket C                                                   | kelompok   |
| Jumlah peserta ujian Paket C                                                      | orang      |
| Jumlah lembaga kursus keterampilan                                                | unit       |
| Jumlah peserta kursus keterampilan                                                | orang      |
| <b>IX. KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                                   |            |
| <b>A. Kualitas Ibu Hamil</b>                                                      |            |
| Jumlah ibu hamil                                                                  | 0 orang    |
| Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu                                              | 0 orang    |
| Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas                                             | 0 orang    |
| Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit                                           | 0 orang    |
| Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek                                        | 0 orang    |
| Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek                                         | 0 orang    |
| Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih                                        | 0 orang    |
| Jumlah kematian ibu hamil                                                         | 0 orang    |
| Jumlah ibu hamil melahirkan                                                       | 0 orang    |
| Jumlah ibu nifas                                                                  | 0 orang    |
| Jumlah kematian ibu nifas                                                         | 0 orang    |
| Jumlah ibu nifas hidup                                                            | 0 orang    |
| <b>B. Kualitas Bayi</b>                                                           |            |
| Jumlah keguguran kandungan                                                        | 0 orang    |
| Jumlah bayi lahir                                                                 | 0 orang    |
| Jumlah bayi lahir mati                                                            | 0 orang    |
| Jumlah bayi lahir hidup                                                           | 0 orang    |
| Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan                                                 | 0 orang    |
| Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan                                                | 0 orang    |
| Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg                                        | 0 orang    |
| Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental | 0 orang    |
| <b>C. Kualitas Persalinan</b>                                                     |            |
| <b>Tempat Persalinan</b>                                                          |            |
| Tempat persalinan Rumah Sakit Umum                                                | 0 unit     |
| Tempat persalinan Rumah Bersalin                                                  | 0 unit     |
| Tempat persalinan Puskesmas                                                       | 0 unit     |
| Tempat persalinan Polindes                                                        | 0 unit     |
| Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak                                        | 0 unit     |
| Tempat persalinan rumah praktek bidan                                             | 0 unit     |
| Tempat praktek dokter                                                             | 0 unit     |
| Rumah dukun                                                                       | 0 unit     |
| Rumah sendiri                                                                     | 0 unit     |
| <b>Pertolongan Persalinan</b>                                                     |            |
| Jumlah Persalinan ditolong Dokter                                                 | 0 tindakan |
| Jumlah persalinan ditolong bidan                                                  | 0 tindakan |
| Jumlah persalinan ditolong perawat                                                | 0 tindakan |
| Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin                                         | 0 tindakan |
| Jumlah persalinan ditolong keluarga                                               | 0 tindakan |
| <b>D. Cakupan Imunisasi</b>                                                       |            |
| Jumlah Bayi usia 2 bulan                                                          | 0 orang    |
| Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1                             | 0 orang    |
| Jumlah bayi usia 3 bulan                                                          | 0 orang    |
| Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2                              | 0 orang    |

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jumlah bayi usia 4 bulan                                                       | 0 orang    |
| Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3                           | 0 orang    |
| Jumlah bayi 9 bulan                                                            | 0 orang    |
| Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak                                      | 0 orang    |
| Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar                                         | 0 orang    |
| <b>E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB</b>                              |            |
| Pasangan Usia Subur                                                            |            |
| Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun                                         | 0 orang    |
| Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun                                      | 0 orang    |
| Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun                             | 0 orang    |
| Jumlah pasangan usia subur                                                     | 0 pasangan |
| <b>Keluarga Berencana</b>                                                      |            |
| Jumlah akseptor KB                                                             | 0 orang    |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik                                        | 0 orang    |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral                                      | 0 orang    |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom                                        | 0 orang    |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil                                         | 0 orang    |
| Jumlah pengguna metode vasektomi                                               | 0 orang    |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi                                   | 0 orang    |
| Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah                                  | 0 orang    |
| Jumlah pengguna metode KB obat tradisional                                     | 0 orang    |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx                                    | 0 orang    |
| Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB                                    | 0 orang    |
| <b>F. Wabah Penyakit</b>                                                       |            |
| <b>G. Angka Harapan Hidup</b>                                                  |            |
| Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan                                    | 0,00 Tahun |
| Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota                                    | 0,00 Tahun |
| Angka Harapan Hidup Provinsi                                                   | 0,00 Tahun |
| Angka harapan Hidup Nasional                                                   | 0,00 Tahun |
| <b>H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih</b>                               |            |
| 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali                                      | 0 Keluarga |
| 2. Jumlah keluarga pelanggan PAM                                               | 0 Keluarga |
| 3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan                             | 0 Keluarga |
| 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa                                     | 0 Keluarga |
| 5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran                              | 0 Keluarga |
| 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum                                     | 0 Keluarga |
| 7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai                                      | 0 Keluarga |
| 8. Jumlah keluarga menggunakan embung                                          | 0 Keluarga |
| 9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air                                   | 0 Keluarga |
| 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut       | 0 Keluarga |
| 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas | 0 Keluarga |
| Total jumlah keluarga                                                          | 0 Keluarga |
| <b>I. Perilaku hidup bersih dan sehat</b>                                      |            |
| Kebiasaan buang air besar                                                      |            |
| Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat                                         | 0 Keluarga |
| Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan             | 0 Keluarga |
| Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan              | 0 Keluarga |
| Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum                            | 0 Keluarga |
| <b>Pola makan</b>                                                              |            |
| Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali                                     |            |
| Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali                                         |            |
| Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali                                         |            |
| Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali                              |            |
| Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali                                  |            |
| <b>Kebiasaan berobat bila sakit</b>                                            |            |
| Dukun Terlatih                                                                 |            |
| Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu                       |            |
| Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif                              |            |
| Paranormal                                                                     |            |
| Obat tradisional dari keluarga sendiri                                         |            |
| Tidak diobati                                                                  |            |
| <b>J. Status Gizi Balita</b>                                                   |            |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Jumlah Balita                | 0 orang |
| Jumlah Balita bergizi buruk  | 0 orang |
| Jumlah Balita bergizi baik   | 0 orang |
| Jumlah Balita bergizi kurang | 0 orang |
| Jumlah Balita bergizi lebih  | 0 orang |
|                              |         |

K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini

| Jenis penyakit | Jumlah penderita | Di rawat di |
|----------------|------------------|-------------|
|----------------|------------------|-------------|

L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Jumlah MCK Umum                                  | 0 unit      |
| Jumlah Posyandu                                  | 0 unit      |
| Jumlah kader Posyandu aktif                      | 0 orang     |
| Jumlah pembina Posyandu                          | 0 orang     |
| Jumlah Dasawisma                                 | 0 Dasawisma |
| Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif                 | 0 orang     |
| Jumlah kader bina keluarga balita aktif          | 0 orang     |
| Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif | 0 orang     |
| Buku rencana kegiatan Posyandu                   |             |
| Buku data pengunjung Posyandu                    |             |
| Buku kegiatan pelayanan Posyandu                 |             |
| Buku administrasi Posyandu lainnya               | 0 jenis     |
| Jumlah kegiatan Posyandu                         | 0 jenis     |
| Jumlah kader kesehatan lainnya                   | 0 orang     |
| Jumlah kegiatan pengobatan gratis                | 0 jenis     |
| Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN  | 0 jenis     |
| Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan           | 0 jenis     |
| Lainnya                                          | 0 jenis     |
|                                                  |             |

X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

A. Konflik SARA

|                                                                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kasus konflik pada tahun ini                                                                                    | kasus   |
| Kasus konflik SARA pada tahun ini                                                                               | kasus   |
| Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga                                                   | kasus   |
| Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW                                                      | kasus   |
| Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli                                                  | kasus   |
| Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain | kasus   |
| Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah                                                              | kasus   |
| Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah                                        | Rp 0,00 |
| Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah                                           | orang   |
| Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan                                                              | orang   |
| Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan                                           | orang   |
| Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah                                        | orang   |
| Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik                                                 | kasus   |
| Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik                              | orang   |
| Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik                        | Rp 0,00 |
| Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara                                             | buah    |
| Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara                                                   | rumah   |
| Jumlah korban luka akibat konflik Sara                                                                          | orang   |
| Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara                                                                     | orang   |
| Jumlah janda akibat konflik Sara                                                                                | orang   |
| Jumlah anak yatim akibat konflik Sara                                                                           | orang   |
| Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum                                                   | orang   |
|                                                                                                                 |         |

B. Perkelahian

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini                 | kasus |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa                | kasus |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah                 | kasus |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material          | kasus |
| Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum | orang |
|                                                               |       |

C. Pencurian

|                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini                      | kasus |
| Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat | kasus |
| Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat | kasus |
| Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api                              | kasus |
| Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum                      | orang |
|                                                                            |       |

D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah

|                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat | kasus |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|



|                                                                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat | kasus |
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat | kasus |
| Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum                                                                 | orang |
| <b>E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan</b>                                                                         |       |
| Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi                                                                       | orang |
| Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini                                                                        | orang |
| Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan                                                                            | orang |
| Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang                                                            | orang |
| <b>F. Pemakaian Miras dan Narkoba</b>                                                                                 |       |
| Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras                                                                             | buah  |
| Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras                                                                               | orang |
| Jumlah kasus mabuk akibat Miras                                                                                       | kasus |
| Jumlah pengedar Narkoba                                                                                               | orang |
| Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba                                                                             | orang |
| Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba                                                                               | kasus |
| Jumlah kasus kematian akibat Narkoba                                                                                  | kasus |
| Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum                                                           | orang |
| Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum                                                         | orang |
| <b>G. Prostitusi</b>                                                                                                  |       |
| Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat                                                                                  | orang |
| Lokalisasi prostitusi                                                                                                 |       |
| Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)  | buah  |
| Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi                                                               | kasus |
| Jumlah pembinaan pelaku prostitusi                                                                                    | kali  |
| Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi                                                                        | kali  |
| <b>H. Pembunuhan</b>                                                                                                  |       |
| Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini                                                                                | orang |
| Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat                                                | kasus |
| Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat                                                               | kasus |
| Jumlah kasus bunuh diri                                                                                               | kasus |
| Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum                                                                               | kasus |
| <b>I. Penculikan</b>                                                                                                  |       |
| Jumlah kasus penculikan                                                                                               | kasus |
| Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat                                                | kasus |
| Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat                                                               | kasus |
| Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum                                                                | kasus |
| <b>J. Kejahatan seksual</b>                                                                                           |       |
| Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini                                                                                 | kasus |
| Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini                                                                            | kasus |
| Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara                                                             | kasus |
| Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat                                                               | kasus |
| Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks                                                           | unit  |
| <b>K. Masalah Kesejahteraan Sosial</b>                                                                                |       |
| Jumlah gelandangan                                                                                                    | orang |
| Jumlah pengemis jalanan                                                                                               | orang |
| Jumlah anak jalanan dan terlantar                                                                                     | orang |
| Jumlah manusia lanjut usia terlantar                                                                                  | orang |
| Jumlah orang gila/stress/cacat mental                                                                                 | orang |
| Jumlah orang cacat fisik                                                                                              | orang |
| Jumlah orang kelainan kulit                                                                                           | orang |
| Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan                                                                    | orang |
| Jumlah rumah dan kawasan kumuh                                                                                        | unit  |
| Jumlah panti jompo                                                                                                    | unit  |
| Jumlah panti asuhan anak                                                                                              | unit  |
| Jumlah rumah singgah anak jalanan                                                                                     | unit  |
| Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota                                                                            | orang |
| Jumlah penghuni bantaran sungai                                                                                       | orang |
| Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api                                                                              | orang |
| Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya                                                              | orang |
| Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif                          | orang |
| Jumlah anak yatim usia 0-18 tahun                                                                                     | orang |
| Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun                                                                                        | orang |
| Jumlah anak yatim piatu 0-18 tahun                                                                                    | orang |
| Jumlah janda                                                                                                          | orang |

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Jumlah duda                                                        | orang |
| Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran                       | orang |
| Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/ sederajat    | orang |
| Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/ sederajat | orang |
| Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/ sederajat | orang |
| Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang       | orang |
| Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga                      | orang |
| Jumlah penduduk eks NAPI                                           | orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir             | orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi      | orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami            | orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi         | orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah    | orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekeringan         | orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor      | orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan    | orang |
| Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan                            | orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih                 | orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus          | orang |
| Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh        | orang |
| Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk     | orang |
| Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman                    | orang |

#### L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri                              | kasus |
| Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami                              | kasus |
| Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak                           | kasus |
| Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua                           | kasus |
| Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya | kasus |

#### M. Teror dan Intimidasi

|                                                                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan                   | kasus |
| Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan                   | kasus |
| Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk  | kasus |
| Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini                                             | kasus |
| Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat                                 | kasus |
| Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal | kasus |

#### N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Organisasi Siskamling                                        |          |
| Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat      |          |
| Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamling/Pos Ronda | RT       |
| Jumlah anggota Hansip dan Linmas                             | orang    |
| Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda                     |          |
| Buku anggota Hansip dan Linmas                               | jenis    |
| Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta            | unit     |
| Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah    | kegiatan |
| Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan                         | Pos      |

### XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT

#### A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara

|                                                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara                                                                    | jenis    |
| Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara                                                                   | kegiatan |
| Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika                                                                                 | jenis    |
| Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika                                                                                      | kegiatan |
| Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya                                                                                          | jenis    |
| Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya                                                                                         | kegiatan |
| Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri                                                                     | kasus    |
| Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi                                                                     | orang    |
| Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi                                                                  | orang    |
| Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan     | kasus    |
| Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga           | kasus    |
| Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini                      | kasus    |
| Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan                        | kasus    |
| Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini                                                           | kasus    |
| Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara | kasus    |
| Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini                                                                    | kasus    |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.                     | kasus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya                                                                    | kasus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah | kasus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan                                                                                                                   | kasus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain                                                    | kasus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan                                                                                                                  | jenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jumlah Wajib Pajak                                                                                                                                                                          | orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Target PBB                                                                                                                                                                                  | Rp 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Realisasi PBB                                                                                                                                                                               | 0,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB                                                                                                                                                      | tindakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan                                                                                                                   | jenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan                                                                                                                         | orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan                                                                                                                               | Rp 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan                                                                                                                            | 0,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan                                                                                                                                              | jenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan                                                                                                                                                | Rp 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan                                                                                                                                                  | 0,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jumlah kasus pungutan liar                                                                                                                                                                  | kasus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar                                                                                                                                                     | kasus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>C. Partisipasi Politik</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih                                                                                                                                                     | orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu                                                                                                                 | orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik                                                                                                              | orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini                                                                                                                   | partai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini                                                                                                                   | partai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan                                                                                                                    | orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu                                                                                                                              | orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil                                                                                                                    | pemilih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2. Pemilihan Kepala Daerah</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih                                                                                                                                                    | orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu                                                                                                                 | pemilih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur yang lalu                                                                                                                   | pemilih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Penentuan Jabatan Kepala Desa                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Penentuan Sekretaris Desa                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Masa jabatan Kepala Desa                                                                                                                                                                    | tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>4. Pemilihan BPD</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jumlah anggota BPD                                                                                                                                                                          | orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Penentuan anggota BPD                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pimpinan BPD                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pemilikan kantor/ruang kerja BPD                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anggaran untuk BPD                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produk keputusan BPD tahun ini                                                                                                                                                              | 1. Peraturan Desa buah<br>2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa kali<br>3. Rancangan Peraturan Desa. buah<br>4. Menyalurkan aspirasi masyarakat kali<br>5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa kali<br>6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa kali<br>7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa kali |

**5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan**

|                                                                                                                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan                                                                                                                      |                 |
| Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD                                                                                                                           |                 |
| Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan | unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK                                                                                                                     |                 |
| Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan                                                                                                                       | unit organisasi |
| Pemilihan pengurus LKD/LKK                                                                                                                                                       |                 |
| Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya        |                 |
| Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK                                                                                                                                 |                 |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK                                                                                                                                        | kegiatan        |
| Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK                                                                                    |                 |
| Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK                                                                                                | kegiatan        |
| Alokasi anggaran untuk LKD/LKK                                                                                                                                                   |                 |
| Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya                                           |                 |
| Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK                                                                                                                                           |                 |
| Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD                                                                        |                 |
| Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK                                                                                                                               | 0,00 %          |
| Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK              |                 |
| Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK                                                                                                                                  |                 |
|                                                                                                                                                                                  |                 |

**C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN****1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan**

|                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan                                                                                                      | kali       |
| Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan                                                                                                                                          | 0,00 %     |
| Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan                                                                                                                                                                                   | 0,00 %     |
| Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan                                                                                                                                                                               | 0,00 %     |
| Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan                                                                                                                                                     | 0,00 %     |
| Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif                                                                                                |            |
| Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan                                                                                                                         |            |
| Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif                                                                                                                            |            |
| Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                     | 0,00 %     |
| Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPP-Desa                                                                                                                           | 0,00 %     |
| Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan     | 0,00 %     |
| Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel                                                                                                                                                             | kegiatan   |
| Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)                                                                                                                                                                           |            |
| Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)                                                                                                                                                                        |            |
| Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan |            |
| Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi                                                                                    | . kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang                                                                                                            | . kegiatan |
|                                                                                                                                                                                                                                               |            |

**2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan**

|                                                                                                                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang                                                                               | 0,00 %   |
| Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota                                          | 0,00 %   |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketentuan dalam APB-Desa                                                      | kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah                                                                               | kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang                                                                             | 0,00 %   |
| Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan                                                                                                                       | 0,00 %   |
| Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan                                                                                                        | 0,00 %   |
| Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat | 0,00 %   |
| Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada                                                                          |          |
| Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.                                                       |          |

|                                                                                                                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah                   | kasus    |
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan                                                                               | kasus    |
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum                                                                    | kasus    |
| Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan                                                               | Jenis    |
| Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan                                                                                              | kegiatan |
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           | kegiatan |
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi                                                                                                       | kegiatan |
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN                                                                                                                     | kegiatan |
| <b>3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk</b>                                                                                                                                |          |
| Jumlah kelompok arisan                                                                                                                                                      | buah     |
| Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh                                                                                                                                      | orang    |
| Ada tidaknya dana sehat                                                                                                                                                     |          |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah                                                                                        |          |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah                                                                                         |          |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus                                                         |          |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana                                    |          |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha                                                                                    |          |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun                                                                               |          |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya                                                            |          |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketenteraman dan keamanan                                                            |          |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian                                                                                       |          |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan                                                                                                       |          |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi                                                                                            |          |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya                                             |          |
| <b>4. Adat Istiadat</b>                                                                                                                                                     |          |
| Adat istiadat dalam perkawinan                                                                                                                                              |          |
| Adat istiadat dalam kelahiran anak                                                                                                                                          |          |
| Adat istiadat dalam upacara kematian                                                                                                                                        |          |
| Adat istiadat dalam pengelolaan hutan                                                                                                                                       |          |
| Adat istiadat dalam tanah pertanian                                                                                                                                         |          |
| Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai                                                                                                                                 |          |
| Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga                                                                                                                                |          |
| Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam                                                                                                               |          |
| Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya                                                                                |          |
| Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar                                                                               |          |
| <b>5. Sikap Dan Mental Masyarakat</b>                                                                                                                                       |          |
| Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan                                                                                                           | jenis    |
| Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar                                                                                                                 | jenis    |
| Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah                                                                                                                      |          |
| Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah                                                                                                                   |          |
| Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal                                                                                 |          |
| Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga                                                                                                                       | jenis    |
| Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga                                                                                                                       | jenis    |
| Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga                                                                                                                             | jenis    |
| Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya.                                              | kasus    |
| Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya                                                                                                          | kasus    |
| Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya                                                                                       | kasus    |
| Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya                                                                                                               | kasus    |
| Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan |          |
| Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan                                                                                             |          |
| Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat                                                                                           |          |
| Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri                                                                                     |          |
| Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain                                                  |          |
| <b>Etos Kerja Penduduk</b>                                                                                                                                                  |          |
| Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas                                                                                                                                     |          |
| Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi                                                                                                        |          |
| Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan                                                                                                        |          |
| Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan                                                                                                                 |          |
| Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain                                                                                     |          |
| Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain                                                         |          |
| Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota                                                                     |          |
| Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya                                                                                                                |          |
| Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak                                                                                               |          |

|                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan        |  |
| Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen                     |  |
| Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu                                                          |  |
| Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah                                                                              |  |
| Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan                                                                                     |  |
| Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan                                                       |  |
| Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya                                         |  |
| Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat |  |

**XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN****A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN**

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK | Tidak |
| Jumlah kegiatan                                                        | Jenis |

**B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

|                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa                                  |  |
| Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan                             |  |
| Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan |  |

**XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN****A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan**

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini | Rp 0,00 |
| Sumber Anggaran                                                 |         |
| APBD Kabupaten/Kota                                             | Rp 0,00 |
| Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota                               | Rp 0,00 |
| Bantuan Pemerintah Provinsi                                     | Rp 0,00 |
| Bantuan Pemerintah Pusat                                        | Rp 0,00 |
| Pendapatan Asli Desa                                            | Rp 0,00 |
| Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan                           | Rp 0,00 |
| Alokasi Dana Desa                                               | Rp 0,00 |
| Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan    | Rp 0,00 |
| Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat              | Rp 0,00 |
| Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan                       | Rp 0,00 |
| Jumlah Belanja Aparatur/pegawai                                 | Rp 0,00 |

**B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah**

|                                                                                                                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD                                                                                           |       |
| Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat | jenis |
| Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa                                                                                                           |       |
| Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota                                                    |       |
| Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat                                                                                       | jenis |
| Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah                   | kasus |
| Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah                         | kasus |

**C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan****1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Gedung Kantor                   | -     |
| Jumlah ruang kerja              | Ruang |
| Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya |       |
| Listrik                         |       |
| Air bersih                      |       |
| Telepon                         |       |

**1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Jumlah mesin tik                  | buah |
| Jumlah meja                       | buah |
| Jumlah kursi                      | buah |
| Jumlah almari arsip               | buah |
| Komputer                          | unit |
| Mesin fax                         | unit |
| Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa | unit |

**1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Buku Data Peraturan Desa |  |
|--------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Buku Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Buku Data Inventaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Buku Data Aparat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Buku Data Tanah Kas Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Buku Administrasi Pajak dan Retribusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Buku Data Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Buku Laporan Pengaduan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Buku Agenda Ekspedisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Buku Profil Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Buku Data Induk Penduduk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Buku Data Mutasi Penduduk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Buku Registrasi Pelayanan Penduduk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Buku Data Penduduk Sementara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Buku Anggaran Penerimaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Buku Kas Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Buku Kas Pembantu Penerimaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Buku Data Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| <b>2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Gedung Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Jumlah ruang kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ruang    |
| Balai BPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -        |
| Listrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Air bersih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Telepon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| <b>2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Jumlah mesin tik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buah     |
| Jumlah meja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buah     |
| Jumlah kursi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buah     |
| Jumlah almari arsip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buah     |
| Komputer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unit     |
| Mesin fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unit     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| <b>2.B. Administrasi BPD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Buku-buku administrasi kegiatan BPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Buku Buku Administrasi Keanggotaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Buku kegiatan BPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Buku himpunan peraturan desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Buku Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| <b>3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Gedung kantor atau Balai Pertemuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Alat tulis kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Barang inventaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jenis    |
| Buku administrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jenis    |
| Jenis kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jenis    |
| Jumlah pengurus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Orang    |
| Jumlah ruang kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ruang    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| <b>D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| <b>1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan serta BPD                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                | kegiatan |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kegiatan |
| Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN | jenis    |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                             | kali     |

|                                                                                                                                                                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing                                                                                                                        | kali     |
| <b>2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>                                                                                                                                          |          |
| Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan                                                                                                                                                    |          |
| Pedoman bantuan keuangan dari provinsi                                                                                                                                                                                  |          |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan                                          |          |
| Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah                                                                                                                       |          |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi                                                                                                      | kegiatan |
| Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan                                                                                                                            | jenis    |
| Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan                                                                                                                                        | jenis    |
| Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan                                                                                                                              | jenis    |
| Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan                                                                                                   | jenis    |
| Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan                                                                                           | jenis    |
| Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan                                                                                                       | jenis    |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing                                                                                                                        | jenis    |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan                                                                     | jenis    |
| <b>3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>                                                                                                                                    |          |
| Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa                                                                                                                                                           | jenis    |
| Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa                                                                                                                                | jenis    |
| Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa                                                                                                                                                    | jenis    |
| Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.                                                                                     | jenis    |
| Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan                                                                                             | jenis    |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan                                          | jenis    |
| Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa                                                                                                                                                                | jenis    |
| Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah                                                                                                                       | jenis    |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota                                                                                                | jenis    |
| Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan                                                                                                                      | jenis    |
| Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan                                                                                                                                  | jenis    |
| Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan                                                                                                                        | jenis    |
| Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD                                                                             | jenis    |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan                                          | jenis    |
| Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan                                                                                                                                                           | jenis    |
| Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan                                                                                                                | jenis    |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan                                                             | jenis    |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing                                                                                                                        | kasus    |
| Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah                                          | kasus    |
| <b>4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan</b>                                                                                                                                                          |          |
| Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa                                                                                                                                          | kali     |
| Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan                                                                                                                                            | kali     |
| Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan                                                                                                                               | kali     |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa                                                                                                                 | kali     |
| Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan                                                                                                                                                        | kali     |
| Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan                                                                                                                                             | kali     |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan                                                                                    | kali     |
| Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum                                                                                                                                       | kali     |
| Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan                                                                                        | kali     |
| Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.                                                    | kali     |
| Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga                                                                                                                              | kali     |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                     | kali     |
| Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan                                                                                                                     | kali     |
| Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat | kali     |
| Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya                                                                                                      | kali     |
| Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.                                                                                                            | kali     |



KAB. SINTANG, 7 Februari 2023  
MELINGKAT  
Kecamatan Kayan Hilir  
Kabupaten KAB. SINTANG

JAMHIRUDIN  
Kepala Desa

Tembusan :

1. Camat Kayan Hilir
2. Bupati KAB. SINTANG
3. Arsip